

PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI DALAM INDUSTRI PARIWISATA DENGAN KONSEP *PENTAHHELIX* STRATEGY

**Lis Julianti, Ni Putu Noni Suharyanti, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi,
I Putu Danny Pramana Putra, Made Natalia Supadmi**

¹²³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail : dannypramana07@gmail.com

ABSTRAK : Pandemi Covid-19 telah membawa dampak sangat besar terhadap perekonomian di Bali. Upaya untuk merumuskan suatu kebijakan strategis dan integratif di bidang pariwisata dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan menerapkan Strategi Pentahelix (*Pentahelix Strategy*) dalam pengembangan industri pariwisata. Strategi ini mengkolaborasikan Akademisi – Bisnis - *Community* (Masyarakat) - *Government* (Pemerintah) dan Media (publikasi) yang berorientasi memenuhi kebutuhan industri pariwisata berbasis kearifan lokal. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan di Kota Denpasar pasca pandemic covid-19 dan mengetahui sinergitas *pentahelix strategy* dalam merumuskan kebijakan pariwisata sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi di Kota Denpasar. Kajian penelitian ini lebih mencerminkan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, suatu tipe penelitian yang tidak saja terhenti pada penggambaran semata melainkan sampai pada upaya pengkajian karakteristik penyelesaian kasus-kasus permasalahan investasi pariwisata dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Kata Kunci; *Pentahelix Strategy*, Pariwisata, Kearifan Lokal

ABSTRACT: *The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy in Bali. Efforts to formulate a strategic and integrative policy in the tourism sector to accelerate the post-Covid-19 economic recovery can be done by implementing the Pentahelix Strategy in the development of the tourism industry. This strategy collaborates with Academia-Business-Community-Government and Media, which are oriented towards meeting the needs of the tourism industry based on local wisdom. The general objective of this study is to determine how the implementation of tourism policy in Denpasar City post-Covid-19 pandemic is conducted, as well as to identify the synergies of the Pentahelix Strategy in formulating tourism policies as an effort to support economic recovery in Denpasar City. This research reflects a descriptive-analytical study, a type of research that is not only limited to description but also efforts to study the characteristics of problem-solving cases in tourism investment. The research method used is qualitative research, often referred to as a naturalistic research method because the research is conducted in natural settings. It is also known as an ethnographic method because it was originally used more in cultural anthropology research. This method is called qualitative because the collected data and analysis are more qualitative in nature.*

Keyword; *Pentahelix Strategy, Tourism, Local Wisdom*

PENDAHULUAN

Terpuruknya pariwisata Bali akibat Covid-19 mengakibatkan Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan daerah baru yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali yang merupakan amandemen dari Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali. Peraturan daerah ini melengkapi Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang sebelumnya hanya terfokus pada penggunaan budaya Bali berbasis Hindu yang dijiwai dengan falsafah Tri Hita Karana yang dijadikan sebagai atraksi wisata budaya di Bali baik yang disuguhkan secara alami (*authentic attraction*) maupun yang dengan sengaja dikemas dan disajikan untuk pariwisata atau *staged attraction* (Bestari dkk., 2020).

Model perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sangat dibutuhkan, apalagi tingkat persaingan produk dan jasa di pasar pariwisata sudah semakin meningkat dengan derajat kualitas, teknologi, dan inovasi yang semakin tinggi, maka sebuah perencanaan pariwisata yang berkelanjutan mutlak diperlukan. Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memenuhi kriteria tertentu seperti menghormati budaya dan lingkungan masyarakat setempat, ekonomi dan cara hidupnya, perilaku adat dan kepemimpinannya, melibatkan penduduknya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan tanggung jawab keberlanjutan. Secara teoritis sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan suatu strategi dan kemampuan menghormati sumber daya pariwisata seperti itu secara berkelanjutan. (I.N.S Arid dan Rohman : 2019).

Upaya untuk merumuskan suatu kebijakan strategis dan integratif di bidang pariwisata dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 dapat dilakukan dengan menerapkan strategi Pentahelik (*Pentahelik Strategy*) dalam pengembangan industri pariwisata. Strategi ini mengkolaborasikan Akademisi-Bisnis-Community (Masyarakat)-Government (Pemerintah) dan Media (publikasi) yang disebut ABCGM yang berorientasi memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Obyek penelitian dipilih secara purposive di Kota Denpasar karena Denpasar merupakan destinasi wisata kedua setelah Kabupaten Badung dan memiliki aktivitas pariwisata yang padat. Mencermati dari penjabaran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Penyusunan Kebijakan Terintegrasi dalam Industri Pariwisata dengan Konsep Pentahelix Strategy”** untuk diteliti.

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kerr (2003) berpendapat bahwa kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata terutama untuk menentukan strategi penca-paian visi pengembangan pariwisata dan juga untuk mengadapai peningkatan dampak dan pengaruh pariwisata terhadap destinasi tersebut. Semua bentuk kebijakan yang diambil dan diterapkan mengarah ke tujuan dan visi pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan dan direncanakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan (policymaker) dalam bidang pariwisata harus mengetahui kondisi terbaru dan dinamisnya kekuatan pasar pariwisata agar dapat merumuskan dan membuat kebijakan yang tepat serta mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi (Edgell dkk., 2008).

Apabila kita melakukan analisis terhadap arah kebijakan Pariwisata Bali, maka kita dapat melihat bahwa arah kebijakan pariwisata Bali dirumuskan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 sampai dengan 2029. Pasal 9 huruf (c) mengatur bahwa tujuan pengembangan kepariwisataan adalah untuk mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian. Pada pasal berikutnya disebutkan bahwa yang menjadi tujuan pengembangan kepariwisataan meliputi peningkatana jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Menurut Goeldner dkk. (2009), Kebijakan pariwisata berisi tentang aturan main (rules of the game), ketentuan-ketentuan, arahan umum dan panduan bagi para stakeholders dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata di suatu destinasi pariwisata. Kebijakan pariwisata mutlak dibutuhkan dalam proses pengembangan pariwisata yang digunakan landasan dasar menjalankan roda pariwisata baik dalam keadaan normal maupun situasi luar biasa (extraordinary) dan atau tidak terduga (unpredictable) dalam bentuk bencana seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan pandemik yang dapat menghentikan aktivitas pariwisata (Hall dan Prayag, 2020; Subadra, 2020).

Apabila dikaji dari sisi teori *welfare state* (negara kesejahteraan) Pemerintah Daerah sebagai pengampu kebijakan di Bali perlu mencari alternatif kebijakan pariwisata untuk keberlangsungan pariwisata di Bali dan kesejahteraan masyarakatnya. *Welfare State* bisa dilihat dari sudut pandang terbatas dan sudut

pandang luas. Dari perspektif terbatas, *welfare state* merupakan tata kelola keuangan pemerintah yang ditujukan untuk sektor rumah tangga (konsumsi dalam negeri, penghasilan, asuransi), serta subsidi atau dana sosial untuk kesehatan anak, pendidikan, kesehatan umum, dan perawatan orang tua.

Menurut (Soemaryani, 2016) Model pentahelix merupakan referensi dalam pengembangan sinergitas antara instansi untuk mencapai tujuan. Menurut (Rampersad, Quester, & Troshani, dalam Halibas, Sibyan, dan Maat, 2017) peran kolaborasi pentahelix memiliki tujuan inovasi dan berkontribusi terhadap kemajuan sosial ekonomi daerah. Selanjutnya (Aribowo, 2019) mengatajan bahwa dalam menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, menciptakan pengalaman serta nilai manfaat kepariwisataan demi memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan sekitar, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran business (bisnis), government (pemerintah), community (komunitas), academic (akademisi), and media (publikasi media) atau BGCA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan sistematika, prosedur serta pelaksanaan “Penyusunan Kebijakan Terintegrasi dalam Industri Pariwisata dengan Konsep *Pentahelix Strategy*”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) wawancara mendalam, informan dipilih secara purposive, yaitu masing-masing dari Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Pariwisata, Badan Penanaman Modal, Akademisi, Bisnis, Komunitas Pariwisata, Komunitas Netizen bersifat Relawan (termasuk blogger, youtuber), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Organisasi Non-Profit Pemilik Hotel dan Restoran maupun Para Profesional, (2) Observasi terhadap *Pentahelix Strategy* Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pembuatan Kebijakan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, (3) Studi dokumentasi, (4) *Focus Group Discussion (FGD)*, dan (5) Workshop. Melalui wawancara terbuka dengan pemangku kepentingan baik dari Pemerintah Kota maupun instansi terkait, termasuk dengan kademisi, Bisnis, Komunitas Pariwisata, Komunitas Netizen bersifat Relawan (termasuk blogger,

youtuber), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), Organisasi Non-Profit Pemilik Hotel dan Restoran maupun Para Profesional. Teknis kegiatan dilakukan dengan menggali, mengeksplorasi, mengidentifikasi dan merumuskan model dan strategi terintegrasi dan berkelanjutan yang dapat dijadikan landasan dalam upaya memulihkan perekonomian pariwisata pasca pandemi Covid-19. Data dianalisis memakai teknik analisis data secara kualitatif disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN PASCA PANDEMI COVID-19

Salah satu langkah yang diambil oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yaitu menyediakan sarana hotel dan transportasi bagi tenaga kesehatan, dimana hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap bisnis hotel dan transportasi agar tetap mempekerjakan pegawainya (Den, 2020). Pemerintah provinsi Bali juga mengambil langkah yang hampir sama dengan memanfaatkan hotel dan villa yang ada di Bali untuk menampung PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk melakukan karantina agar tidak terjadi transmisi lokal. Hal ini merupakan langkah yang sangat tepat karena ini merupakan jawaban bagi para pelaku pariwisata di Bali dan juga para pahlawan devisa Bali.

Apa yang harus kita persiapkan sebagai pelaku pariwisata di Indonesia, Bali khususnya setelah pandemi ini berakhir. Standarisasi kesehatan dan keamanan adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah bersama dengan pengelola industri pariwisata. Kemudian berusaha menyiapkan beberapa alternatif berwisata baru di masa pandemi yang tetap menarik minat wisatawan tetapi aman dan dapat dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelaku pariwisata untuk memberikan rasa aman dan nyaman berwisata di masa pandemi ini yakni:

a. High Standard Sanitation

Penerapan standar kesehatan dengan membuat sanitasi yang memadai. Menurut Ni Wayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pihaknya akan menyiapkan destinasi sesuai dengan kondisi 'new

normal' dengan mengedepankan prinsip sustainable tourism, termasuk di dalamnya soal kesehatan, dan keamanan (Wahyudi, 2020).

b. High Standard Security

Standar keamanan adalah hal penting yang wajib diperhatikan. Peningkatan standar keamanan di daerah wisata di Bali karena kenyamanan wisatawan akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisata.

c. Staycation

Staycation ini merupakan pilihan wisata bagi turis yang masih belum berani untuk berbaur dengan wisatawan lain.

d. Niche tourism

Perubahan yang sangat besar akan terlihat dari kelompok wisatawan dalam berwisata. Jika dahulu mereka berada dalam kelompok yang besar karena akan menghemat budget. Tetapi mengingat standar yang tinggi akan keamanan dan kenyamanan maka pilihan Niche tourism menjadi sangat penting karena mereka akan ada dalam kelompok kecil dengan kesamaan hobi, ketertarikan atau kesamaan visi.

e. Solo travel tour

Penggunaan individual transportation akan lebih tinggi dibandingkan mass transport karena physical distancing ini akan berlangsung lebih lama dari perkiraan kita sebelumnya sehingga ketakutan wisatawan untuk berada dalam satu moda transportasi dapat dihindari.

f. Wellness tour

Wisata yang satu ini diciptakan untuk mengisi ulang tubuh dan menyehatkan pikiran. Wellness tour ini menawarkan keseimbangan sempurna antara tujuan yang menakjubkan, kegiatan peremajaan, dan pengalaman makanan sehat sehingga akan membantu wisatawan yang kembali ke rumah dengan perasaan lebih baik daripada ketika mereka sebelum bepergian pergi.

g. Virtual tourism

Teknologi yang berkembang dalam bidang pariwisata yaitu meningkatnya platform atau aplikasi yang mampu memberikan pengalaman nyata berwisata ke

objek-objek wisata di Bali. Walaupun hal ini tidak mampu menandingi pengalaman langsung berwisata seperti merasakan keramahan masyarakat lokal, menghirup bau dupa, menyentuh berbagai sarana upacara di Bali seperti canang maupun banten, ataupun merasakan menari bersama para penari kecak di panggung tapi hal ini mampu memberikan kesan pada wisatawan yang masih takut untuk berwisata secara langsung.

3.2. SINERGITAS PENTAHELIX STRATEGY DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PARIWISATA SEBAGAI UPAYA Mendukung PEMULIHAN EKONOMI

Sebelum pandemi, Pariwisata Bali adalah salah satu tujuan wisata paling populer di dunia. Pesona memikat terpancar dari keindahan pulau Bali. Perkembangan pariwisata Bali dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya masyarakat Bali. Adat, seni, dan budaya Bali sebagai potensi dasar yang dominan di dalamnya tersirat suatu idealitas hubungan timbal balik antara pariwisata dan budaya. Hal ini menjadi salah satu keunikan tersendiri dibandingkan dengan destinasi lain di Indonesia (Paramita dan Putra, 2020). Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sektor perjalanan dan pariwisata sangat terpengaruh oleh pandemi covid-19 (Sugihamretha, 2020). Gambar 3.1 menyajikan jumlah kunjungan wisman langsung kunjungan wisatawan asing ke Bali.



Gambar 1 Jumlah Kunjungan Turis Asing Langsung ke Bali 2020-2021

(Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2021)

Gambar 1 dengan jelas menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2020 jumlah wisman yang berkunjung ke Bali mulai menurun, bahkan drastis pada April 2020. Hingga pertengahan tahun 2021 (Mei 2021), jumlah wisman yang berkunjung ke Bali hanya 42 orang. Hal ini tentunya sebagai akibat dari pembatasan sosial, penutupan akses ke Bali, pembatasan perjalanan, dan persepsi masyarakat umum tentang bahaya pandemi (Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2021). Penurunan kunjungan wisatawan (terutama wisatawan asing) berdampak pada sektor akomodasi. Okupansi hotel di Bali turun. hingga 80%-90%, bahkan ada yang menutup usaha hotelnya. Terkait hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman terkait protokol perjalanan wisata khususnya di Provinsi Bali pada masa pasca covid-19. Secara umum, protokol perjalanan wisata di Provinsi Bali diatur dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran covid-19 dengan kegiatan utama pelaku usaha pariwisata juga harus menerapkan pola protokoler baru sebagai bagian dari upaya untuk tetap bertahan dan menjaga keberlangsungan sektor pariwisata. Terkait hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman terkait protokol perjalanan wisata khususnya di Provinsi Bali pasca pandemi covid-19

Dalam upaya memulihkan pariwisata Bali, diperlukan sinergi semua pihak dalam upaya ini. Sejarah perkembangan konsep sinergi dalam pengembangan pariwisata berawal dari ide triple-helix yang diadopsi dari teori Etzkowitz dan Leydesdorff. Konsep triple helix ini menekankan pada hubungan antara universitas, industri dan pemerintah. Pada tahun 2014, Lindberg mengembangkan konsep baru yang disebut quadruple helix dengan menambahkan elemen masyarakat lokal sebagai pelengkap konsep triple-helix yang telah dikembangkan. Sementara itu, konsep penta-helix dikemukakan oleh Riyanto dengan melibatkan media, yang saat ini berperan sangat signifikan dalam mengembangkan modal sosial untuk pembangunan. Konsep *Pentahelix* mengkolaborasikan *Akademisi-Bisnis-Community* (Masyarakat)-*Goverment* (Pemerintah) dan *Media* (publikasi) yang disebut ABCGM yang berorientasi memenuhi kebutuhan industri pariwisata berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *pentahelix* *sstrategy* merupakan model inovasi yang digunakan dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan tingkat perekonomian suatu negara atau wilayah yang melibatkan lima pemangku kepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha (swasta), media, akademisi dan masyarakat, adapun peran *pentahelix* dalam Pemulihan Kepariwisata khususnya di Bali.

NO	ELEMEN <i>PENTAHHELIX</i>	PERAN DALAM PARIWISATA	PERAN DALAM PEMULIHAN
-----------	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

			PARIWISATA
1	Pemerintah	1. Pengembangan kepariwisataan melalui: pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.	1. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan standardisasi; 2. Mengeluarkan kebijakan yang mendukung kredit kepada pengusaha dan transfer dana desa.
2	Bisnis/ Industri/ Sektor swasta	1. Menciptakan peluang kerja; 2. Rekrutmen SDM lokal sebagai pelaku industry pariwisata	1. Membuat terobosan dalam jenis usaha yang sesuai dengan standar kesehatan; 2. Menggunakan sentuhan teknologi dalam bisnis; 3. Menerapkan protokol Kesehatan dalam bisnis.
3	Akademisi	1. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 2. Melaksanakan kajian ilmiah; 3. Melaksanakan sosialisasi	1. Memberikan masukan kebijakan berdasarkan kajian yang dilakukan;

		dan pendampingan kepada kelompok masyarakat.	2. Memberikan data dan masukan terkait kebutuhan baru era pariwisata.
4	Lokal Komunitas/ Bali	1. Melaksanakan kajian ilmiah; 2. Memantau dampak pariwisata terhadap budaya dan sosial masyarakat.	1. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya di tempat wisata; 2. Mendukung kebijakan pemerintah.
5	Media	1. Instrumen promosi, penyebaran informasi dan peningkatan citra pariwisata	1. Sebagai media promosi pariwisata yang sehat; 2. Menciptakan kenyamanan masyarakat dengan berita yang membangun; 3. Melaporkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan ekonomi sehingga mudah diakses oleh semua pihak.

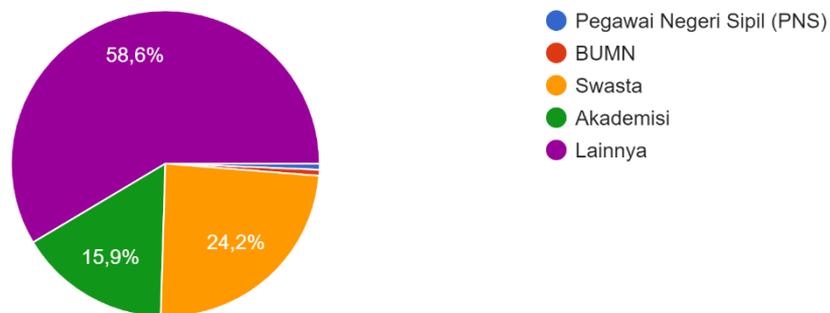
Tabel 5 Peran *Pentahelix* dalam Pemulihan Pariwisata dan Pariwisata Bali

Dalam rangka penyempurnaan dan kelengkapan data hasil penelitian, dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden baik kepada Pemerintah, Komunitas, Akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usaha. Sebanyak 157 responden yang berasal dari berbagai kalangan memberikan respon atau masukan melalui pengisian kuesioner. Adapun data hasil analisis kuesioner penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pekerjaan

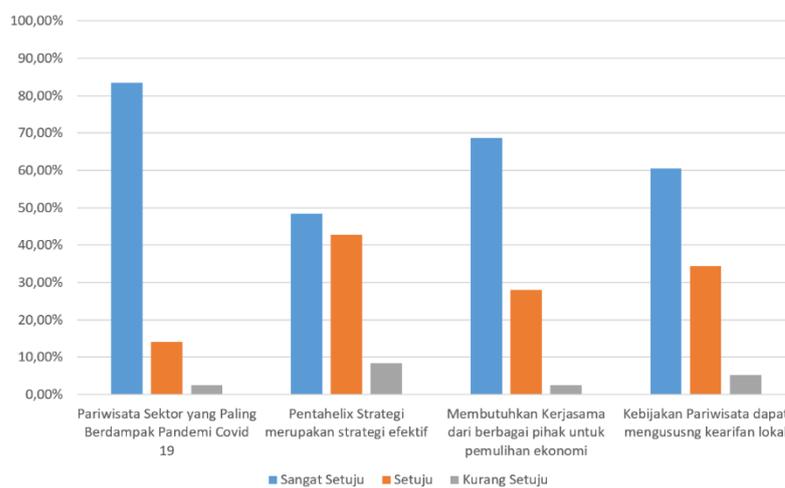
Pekerjaan:

157 jawaban



Gambar 2 Diagram Pekerjaan Kuesioner

2. Pertanyaan



Gambar 3 Diagram Hasil Jawaban Responden



Gambar 4 Formulasi Pembuatan Kebijakan

Penyusunan rumusan kebijakan tersebut diperoleh isu strategis terkait kebijakan pariwisata yang memuat kondisi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kebijakan - kebijakan sebelumnya yakni *analysis of policy* yang menganalisis terkait struktur, substansi, dan isi kebijakan dan yang kedua *for policy* yang membahas terkait dengan informasi kebijakan dan advokasi kebijakan, sehingga melalui analisis kebijakan tersebut dihasilkanlah sebuah evaluasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan khususnya dalam bidang kepariwisataan, tahap kedua melakukan tahap penyusunan kebijakan, dimana dalam penyusunan kebijakan ini pemerintah bekerja sama dengan pemangku-pemangku kepentingan di bidang pariwisata yakni Akademisi-Bisnis-Community (Masyarakat)-Government (Pemerintah) dan Media (publikasi) yang bertujuan untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan

stakeholders dan merumuskan muatan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga mendukung perkembangan industri kepariwisataan di Bali, selanjutnya dirumuskan naskah akademis terkait dengan kebijakan tersebut sehingga melahirkan draft kebijakan kepariwisataan terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengkolaborasikan 5 (lima) pihak yang berperan dalam menyusun kebijakan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Identifikasi potensi-potensi dan kebijakan pariwisata yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal di Kota Denpasar dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang terhadap kebijaka-kebijakan kepariwisataan yang telah dibuat dan dilaksanakan di Kota Denpasar, hal ini dilakukan untuk dapat memformulasi kebijakan terintegrasi baik dalam aspek ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Implementasi penyusunan kebijakan terintegrasi dalam bidang kepariwisataan dilakukan dengan menyusun perencanaan perumusan kebijakan, dimana penyusunan rumusan kebijakan tersebut diperoleh dari isu strategis terkait kebijakan pariwisata yang memuat kondisi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan kebijakan kepariwisataan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kebijakan - kebijakan sebelumnya yakni *analysis of policy* yang dan yang kedua *analysis for policy* sehingga melalui analisis kebijakan tersebut dihasilkanlah sebuah evaluasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kebijakan khususnya dalam bidang kepariwisataan. Tahap kedua melakukan tahap penyusunan kebijakan, dimana dalam penyusunan kebijakan ini pemerintah bekerja sama dengan pemangku-pemangku kepentingan di bidang pariwisata yakni Akademisi-Bisnis-Community (Masyarakat)-Government (Pemerintah) dan Media (publikasi) yang bertujuan untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan stakeholders dan merumuskan muatan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga mendukung perkembangan industri kepariwisataan di Kota Denpasar.

b. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Daerah dapat mulai melakukan kajian akademik terkait penyusunan kebijakan terintegrasi dalam bidang kepariwisataan dengan menggunakan metode RIA (*Regulatory Impact Assesment*) untuk dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, khususnya di Kota Denpasar.
2. Hendaknya kolaborasi elemen-elemen yang ada dalam Pentahelix strategi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun produk hukum yang bersifat kongkrit sehingga mampu untuk menanggulangi kelompok ekonomi pada satu sektor yang berdampak sistemik. Kontribusi elemen-elemen terkait diharapkan menghasilkan peluang bagi perkembangan kepariwisataan di masa yang akan datang.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Edgell, D.L., Allen, M.D., Smith, G. dan Swanson, J.R. (2008). *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow*. Oxford, UK: Elsevier Inc.

Goeldner, C.R. dan J. R. Brent Ritchie, J.R.B. (2009). *TOURISM: Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey, Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Hall, C. M. dan Prayag, G. (2020). *Tourism and Earthquakes*. Bristol, United Kingdom: Channel View Publications.

Kerr, W. R. (2003). *Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure*, Oxford, UK: Elsevier Ltd.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas

JURNAL

Ariowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2019). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal Mebis*, 31–38.

Arid, I N. S. & Rohman (2019). *Perencanaan Pariwisata dan Keberlanjutan Lingkungan*. Jakarta: Cakra Media Utama, h. 16.

Bestari, I P.P., Suryawardani, I G.A.O., dan Wiranatha, A.S. (2020). “Respon terhadap Otentisitas: Tanggapan Wisatawan Asing terhadap Unsur-unsur Budaya dalam Tiga Hotel Internasional di Bali”, *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, Vol. 10, No.1, hal. 139–162.

Elviandri, E, 2019, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 2, hal. 254.

Paramita and Putra (2020). “New Normal Bagi Pariwisata Bali Di Masa Pandemi Covid 19. Pariwisata Budaya”, *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*. Vol.05 No.02. Hal 57-65.

Subadra. I Nengah (2021). Pariwisata Budaya dan pandemic Covi-19 : memahami Kebijakan Pemerintah dan Reaksi Masyarakat. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)* Volume 11 Nomor 01, April 2021. Hal. 1-22.

Sugihamretha, IDG (2020). Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Indonesia Perencanaan Pembangunan*, IV(2), 191-206.

Soemaryani Imas. (2016). Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Journal Academy of Strategic Management* .Volume 15, Special Issues 3.

INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2021). Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang). tersedia secara online di <https://bali.bps.go.id/indicator/16/106/1/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>. Diakses 10 Pebruari 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.